

Sekdaprov Adhy Karyono Optimis Jatim Mampu Pertahankan Nilai Tertinggi Untuk EPPD Tahun 2021

Achmad Sarjono - JATIM.KAMPAI.CO.ID

Jul 20, 2022 - 10:12



SURABAYA - Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan rasa optimisnya bahwa Jawa Timur bisa mampu mempertahankan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2021 yang pada tahun sebelumnya

mendapatkan nilai tertinggi

Untuk diketahui, Jawa Timur selalu menjadi nomor satu untuk menyampaikan hasil dari laporan EPPD. Laporan dari EPPD Prov. Jawa Timur menjadi bukti bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) milik kabupaten/kota juga menjadi berada diperingkat tertinggi.

"Capaian penilaian tertinggi dan nomer satu adalah kerja keras kita semua di provinsi, kabupaten/kota. Kalau tahun kemarin EPPD bisa mencapai nilai tertinggi jangan sampai tahun ini penilaian untuk tahun 2021 rangkingnya turun," ungkapnya saat membuka Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021 di Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Selasa (19/7/2022).

Adhy panggilan akrabnya itu meminta, kepada kabupaten/kota yang belum lengkap data pelaporannya terkait EPPD untuk segera memenuhi sehingga laporan yang dihasilkan bisa baik serta akuntabel.

EPPD ini, sebut Sekdaprov, merupakan sebuah kesimpulan atau penilaian terhadap sebuah laporan yang disesuaikan dengan kondisi di masing masing daerah berdasarkan target dari RKPD maupun RPJMD.

"Kita optimis kabupaten/kota yang belum lengkap datanya bisa terpenuhi dengan baik serta akuntabel. Kami mohon tahun ini ditingkatkan kinerja maupun kualitas pelaporannya. Sehingga nantinya bukan hanya rangking satu yang kita raih melainkan data pelaporannya bisa lengkap dan akuntabel," jelasnya.

Ia mengatakan, bahwa EPPD penilaian tahun 2021 merupakan salah satu tools untuk memonitor kinerja para kepala daerah. Sekaligus memonitor dan mendeteksi kinerja baik terhadap kelebihan dan kekurangan kinerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

"Hasil Evaluasi LPPD ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan bagi sinkronisasi perencanaan pembangunan bagi kabupaten/kota dengan provinsi. Serta pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Sekdaprov berharap, kepada tim yang akan bekerja di lapangan bukan bertindak sebagai auditor melainkan menjadi patner dan pembina yang akan mendukung kinerja para tim EPPD di kabupaten/kota. Maka, Tim dari Inspektorat, Bappeda hingga Biro Hukum harus turun memberikan pendampingan sekaligus pembinaan jika ada daerah yang belum dipenuhi.

"Kami mohon tim yang bekerja di lapangan bukan sebagai auditor melainkan menjadi pembina, pengingat supaya LPPD nya lengkap sehingga kinerja dari kepala daerah di Prov. Jatim bisa dinilai akuntabel dan mendapatkan nilai tinggi," ungkapnya.

Turuni Tangga, Sekdaprov Sapa Pegawai Biro di Sekretariat Daerah

Seusai membuka sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) di Graha Wicaksana Praja Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Sekdaprov

berkesempatan menyapa para pegawai di masing-masing biro yang ada di Sekretariat Daerah Prov. Jatim.

Terdapat hal yang menarik, yakni kesederhanaan sosok Sekdaprov Jatim yang berkenan menuruni tangga. Ketika, Sekdaprov akan berkunjung ke masing-masing biro dari lantai 7 hingga lantai 1 yakni menuruni anak tangga daripada menggunakan lift yang ada.

Ketika berada di Lantai 6 tempat Biro Adm. Pemerintahan dan Biro PBJ, Sekdaprov menyempatkan bersapa dengan para staf yang sedang bekerja. Dengan didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jempin Marbun, Sekdaprov memberikan dukungan semangat bekerja dan berfoto dengan para pegawai.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov Adhy mendapat penjelasan dan informasi oleh Kepala Biro Adm. Pemerintahan dan Otda bahwa salah tugas pokoknya diantaranya mengurus terkait kegiatan pemerintahan utamanya koordinasi dengan bupati/walikota se Jatim.

"Ijin melaporkan bapak, di biro kami untuk izin cuti maupun perjalanan ke luar negeri bagi bupati walikota harus berkoordinasi dengan biro kami," ungkapnya.

Sama halnya ketika berada di Lantai Lima Biro Kesra, yang didampingi langsung oleh Kabiro Kesra Gatot yang menyampaikan tupoksinya salah satunya menyalurkan dana hibah bagi lingkungan Ponpes maupun proposal kegiatan keagamaan serta tempat peribadatan.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov memberikan masukan kepada Biro Kesra untuk dibuatkan sistem agar permohonan bantuan hibah dalam bentuk apapun bisa melalui sistem agar menghindarkan orang bertemu orang.

Selain itu, Biro Kesra juga harus memiliki mapping daerah mana, atau wilayah mana saja yang sudah mendapat bantuan sehingga pemerataan bantuan hibah dalam bentuk apapun bisa dilakukan dengan adil. (*)